

**ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
(Dalam Pemilihan Umum 2014)**

Oleh:

Desta Trianggoro, Endang Larasati, Nina Widowati

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In a country that is implementing a democratic system such as in Indonesia, Election is implementation of popular sovereignty which aims to bring a democratic government elected by the people. To perform their duties in administration of Elections, the Commissions established as one of the organizers of Election. This study will analyze the performance of Election Commission of Semarang and the dimensions that support and hinder the performance of Election Commission of Semarang in the National Election of 2014. This study uses the theory of organization and performance of the five dimensions they are productivity, service orientation, responsiveness, responsibility, and accountability with qualitative descriptive approach. To collect the data use the technique of observation, interviews, documentation, and literature study from informant's employees of Election Commission of Semarang.

The results show the performance of Election Commission of Semarang in National Election of 2014 is not optimal yet, they found several obstacles on the dimensions of the problem of productivity such as human resources, limited budget and the socialization has not optimal yet. While the dimensions that support performance Election Commission of Semarang other already performing optimally, they are service orientation, responsiveness, responsibility, and accountability.

To overcome the obstacles found, there are some suggestions that can be carried out by the Election Commission of Semarang to optimize its performance, such as education, training, and skills to improve the quality of human resources, increasing the number of human resources through the recruitment of government employees or increase the number of temporary employees, proposes increasing the number of budget in accordance with the needs required and improving the socialization to public intensively and regularly, not only at Election time is getting closer, but by applying democracy in everyday life.

Keywords: *performance, Election Commission, Election*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan mengatur bagaimana sebuah prosedur atau cara seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Tiga Pemilihan Umum di era reformasi yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009 adalah Pemilihan Umum yang lebih demokratis dibandingkan Pemilihan Umum di masa Orde Baru.

Aturan tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, setelah reformasi terjadi, peraturan terkait Pemilihan Umum dibuat dalam bentuk konstitusi dan masuk ke dalam UUD 1945. Pembentukan lembaga negara dalam penyelenggara Pemilihan Umum juga dibentuk sebagai upaya dalam pembenahan Pemilihan Umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga DKPP RI.

Agar dapat terwujud Pemilihan Umum sesuai dengan harapan, maka Pemilihan Umum mensyaratkan adanya penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas yang tinggi yang dapat dilihat dari tiga integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Kedua, integritas pada hasil-hasil Pemilihan Umum. Dan ketiga, integritas proses dan hasil yang sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilihan Umumnya yaitu KPU dan Bawaslu.

Dalam menjalankan tugasnya di Kota Semarang, KPU membentuk KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Semarang. Namun dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum timbul kekhawatiran terhadap ke-tidakprofesionalan KPU dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketidakprofesionalan kerja KPU daerah maupun pusat menimbulkan kekhawatiran terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Secara umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 di Kota Semarang, KPU Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Umum masih belum optimal. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 di Kota Semarang dapat dilihat pada masih banyaknya masyarakat yang belum terfasilitasi hak memilihnya sebagai pemilih untuk masuk ke dalam daftar pemilih dalam Pemilihan Umum 2014, selain itu juga ditemukan pencoretan salah seorang calon legislatif DPRD Kota Semarang yang tidak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada, kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya juga dirasakan masih kecil sekitar 75% hingga 80%.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan tersebut, penelitian ini akan menganalisis kinerja yang dihasilkan

oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014.

b. Tujuan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014.
2. Menganalisis dimensi-dimensi yang mendukung dan menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014.

c. Teori

1. Organisasi

Organisasi menurut Robbins (dalam Keban, 2008:127) adalah suatu kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas teratur dalam rangka mencapai suatu atau rangkaian tujuan. Istilah terkordinasi secara sadar menggambarkan adanya manajemen, sedangkan kesatuan sosial menggambarkan kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain. batasan yang relatif jelas menunjukkan bahwa ada kontrak antara organisasi dengan anggotanya sehingga orang dapat membedakan mana yang menjadi anggota dan mana yang bukan anggota.

2. Kinerja

Wibowo (2007:7) mengartikan kinerja sebagai hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang apa yang

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja sebagai sebuah pencapaian hasil yang telah dicapai organisasi baik secara kualitas dan kuantitas yang akan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja akan menjadi isu yang penting dalam sebuah organisasi, karena apapun organisasinya kinerja menjadi kunci dari efektifitas atau keberhasilan dari sebuah organisasi. Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang diambil dari bahasa Inggris, yang diartikan sebagai unjuk kerja, kinerja, hasil karya, karya, pelaksanaan kerja, hasil pelaksanaan kerja. Kinerja memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hasil kerja, yaitu termasuk makna bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

3. Indikator Kinerja

Di dalam mengukur kinerja organisasi publik di Indonesia, menurut Dwiyanto mengemukakan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

a. Produktifitas

Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.

b. Orientasi Kualitas Pelayanan

Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat

dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

d. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai KPU Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data berbentuk kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara,

dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

a. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014

1. Produktifitas

Produktivitas KPU Kota Semarang dapat dilihat pada bagaimana cara dalam menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap), KPU Kota Semarang dalam menyusun DPT melalui Data Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian distribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS yang bertugas mencocokkan data dengan para pemilih dengan cara mendatangi rumah (per RT). Setelah itu data hasil pencocokan ditetapkan melalui sidang Pleno ketetapan DPS. Dan DPS ini dikoreksi kemudian ditetapkan di PPS yang berupa perbaikan terhadap DPS terus ke PPK dan sampai ke KPU Kota Semarang sehingga melahirkan DPT.

KPU Kota Semarang dalam memberikan informasi pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui sosialisasi/diskusi ke berbagai lapisan masyarakat, media informasi cetak seperti spanduk, media elektronik seperti televisi lokal, *talkshow* lewat radio, dan *announcer* di lampu lalu lintas.

Produktivitas program yang dicapai oleh KPU Kota Semarang sepenuhnya telah terlaksana. Hal ini dikarenakan pada program KPU Kota Semarang sudah tersusun dalam jadwal yang masuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga program tersebut harus terlaksana sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah tersusun dan sudah diatur dalam Peraturan KPU.

KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014 sudah menunjukkan kualitas program yang baik dengan melihat tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum. Peningkatan ini dibandingkan Pemilihan Umum sebelumnya yaitu Pemilihan Umum Pilpres dan Pileg 2009, Pemilihan Umum Walikota 2010, dan Pemilihan Umum Gubernur 2013. Kenyataan ini menunjukkan kualitas yang naik pada program KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.

KPU Kota Semarang menghadapi banyak kendala dan tantangan untuk menjalankan program-program dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Kendala dan tantangan yang dihadapi begitu beragam, yaitu terdiri atas masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki, minimnya distribusi dana yang diperoleh, sulitnya mengawasi seluruh

2. Orientasi Kualitas Pelayanan

Orientasi Kualitas Pelayanan KPU Kota Semarang dapat dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014 yang dibagi menjadi dua macam, yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2014. Pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pendataan sebagai pemilih, sosialisasi, informasi hasil Pemilihan Umum, dan pelayanan ketika berada di TPS. Sedangkan pelayanan kepada peserta dalam bentuk informasi jumlah pemilih, pendaftaran peserta, verifikasi peserta, hingga proses penyelesaian selesai. Serta pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan baik pemilih maupun peserta.

Pelayanan yang diberikan oleh KPU Kota Semarang sudah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Seperti pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah melalui *website* yang dimiliki KPU Kota Semarang. Pelayanan di tingkat Kecamatan hingga TPS juga dapat diperoleh melalui petugas KPU yang

ada di lapangan yaitu PPK, KPPS dan PPS yang tersebar. Kemudahan lainnya juga terlihat dengan disediakannya pelayanan bagi masyarakat apabila membutuhkan pelayanan di kantor KPU Kota Semarang.

Kesiapan sumber daya yang menjadi permasalahan utama adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPU Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melihat pada sisi kuantitas masih kurang dibanding dengan beban kerja yang dimiliki KPU Kota Semarang. Sementara itu pada sisi kualitas masih ada perlu perbaikan walaupun pada saat ini masih dapat saling melengkapi antar pegawainya.

3. Responsivitas

Responsivitas KPU Kota Semarang dapat dilihat pada ara KPU Kota Semarang dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dijadikan program yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan seluruh lapisan masyarakat. Dalam diskusi tersebut, KPU Kota Semarang mendapat kesempatan untuk menjangkau informasi terkait kebutuhan masyarakat. Waktu menangkap kebutuhan masyarakat oleh KPU Kota Semarang adalah saat masa pra Pemilihan Umum dan masa penyelesaian.

Dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah menerima aspirasi tersebut untuk menjadi masukan bagi KPU Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan

Pemilihan Umum, namun dalam menerima aspirasi tersebut KPU Kota Semarang juga mempertimbangkan aspirasi tersebut dengan asas kepatutan dan kesesuaian hukum. Asas kepatutan yaitu apakah aspirasi tersebut patut untuk diterima atau tidak, sedangkan kesesuaian hukum apakah aspirasi tersebut melanggar peraturan atau tidak.

KPU Kota Semarang dalam menjalankan programnya selama tahapan Pemilihan Umum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Melalui sosialisasi, diskusi dan FGD, KPU Kota Semarang menangkap kebutuhan dan mengimplementasikan program sesuai hasil forum bersama masyarakat tersebut. Program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga dirasakan oleh masyarakat langsung, dalam Pemilihan 2014 yang lalu masyarakat tidak menemukan kesulitan selama penyelenggaraan Pemilu.

4. Responsibilitas

Responsibilitas KPU Kota Semarang dapat dilihat dari bagaimana KPU Kota Semarang dalam menyusun sebuah program maupun kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014, KPU Kota Semarang dalam menyusun program sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan KPU Kota Semarang dalam melaksanakan program dan kegiatan. Regulasi yang menjadi acuan KPU Kota Semarang dalam menyusun program dan kegiatan yaitu Peraturan

KPU, Peraturan Pemerintah, dan juga Undang-Undang yang berlaku.

Prosedur dalam penyusunan sebuah program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang yaitu program tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku. Peraturan ini utamanya memperhatikan Peraturan KPU RI yang dalam menyusun program disesuaikan dengan peraturan tersebut, KPU Kota Semarang bertugas menjabarkan peraturan tersebut melalui program-program yang akan dilaksanakan sehingga bersifat vertikal.

5. Akuntabilitas

Dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang melalui dua sarana, yaitu transparansi melalui sarana *website* yang dimiliki KPU Kota Semarang dan juga melalui media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen menempel terkait informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat dan peserta Pemilihan Umum 2014. Untuk transparansi penggunaan anggaran juga dapat dilihat pada *website* BPK RI setelah evaluasi dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPK.

Bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berbentuk vertikal yaitu KPU Kota Semarang menyusun pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, kemudian selanjutnya diserahkan

kepada KPU RI dan akan dilanjutkan ke Pemerintah dan DPR sebagai *stakeholder*.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014

Kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014 belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang terdapat pada dimensi produktivitas, orientasi kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari kelima dimensi tersebut masih ditemukan dimensi yang belum berjalan optimal yaitu dimensi produktivitas. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa permasalahan pada dimensi tersebut yaitu, masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, masih belum optimalnya upaya KPU Kota Semarang dalam memaksimalkan sosialisasi, dan juga masih minimnya dana yang didistribusikan kepada KPU Kota Semarang.

2. Dimensi pendukung kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014.

Dimensi Orientasi Pelayanan

- a. Tersedianya berbagai jenis pelayanan dalam Pemilihan Umum 2014.
- b. Kemudahan akses pelayanan dengan tersedianya pelayanan di tingkat Kecamatan hingga

TPS oleh panitia *ad hoc* yaitu PPK, KPPS, dan PPS.

- c. Kejelasan informasi memperoleh pelayanan

Dimensi Responsivitas

- a. KPU Kota Semarang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
- b. Respon yang baik dari KPU Kota Semarang terhadap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.
- c. Program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dimensi Responsibilitas

- a. Dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Prosedur penyusunan program sudah sesuai dengan prosedur peraturan yang ada.

Dimensi Akuntabilitas

- b. Terbukanya seluruh informasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.
- b. Bentuk pertanggungjawaban yang vertikal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dimensi penghambat kinerja KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014.

Dimensi Produktivitas

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Semarang.

- b. Masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang.

- c. Masih minimnya distribusi dana yang diterima oleh KPU Kota Semarang.

b. Saran

Di dalam mengatasi permasalahan dimensi-dimensi yang menjadi penghambat KPU Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014 ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kota Semarang melalui penguatan penguasaan keahlian dan teknologi melalui berbagai pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang harus di jalankan secara berkala. Hal ini dilakukan agar kompetensi pegawai KPU Kota Semarang dalam bekerja dapat meningkat dan dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang. Selain itu, kekurangan jumlah pegawai perlu segera ditangani dengan penambahan jumlah sumber daya manusia melalui rekrutmen PNS yang dibutuhkan melalui kebijakan Pemerintah Pusat atau dengan menambah jumlah tenaga honorer agar pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal.

Untuk meningkatkan partisipasi peran masyarakat yang belum optimal, diperlukan sebuah sosialisasi yang lebih intensif terkait Pemilihan Umum, selain itu pendidikan politik juga perlu diberikan kepada masyarakat tidak hanya ketika Pemilihan Umum semakin mendekat, melainkan

menerapkan pendidikan demokrasi melalui berbagai kegiatan masyarakat dengan menerapkan sistem demokrasi di setiap kegiatan masyarakat. Seperti penerapan proses Pemilihan Umum yang sebenarnya di tingkat pemilihan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, pemilihan Ketua OSIS maupun kegiatan lainnya.

Dibutuhkan juga distribusi dana yang lebih besar kepada KPU Kota Semarang yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi geografis dan demografi sehingga dapat memberi ruang kepada KPU Kota Semarang untuk memaksimalkan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harbani, Pasolong. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Indrayana, Denny. (2011). *Indonesia Optimis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Teknik Penyusunan Organisasi Berkinerja Tinggi*. Jakarta : Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mangkunegara. (2001). *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ruky Achmad. (2002). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Salim, Agus. (2006). *Bangunan Teori: Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sembiring Masana. (2012). *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintahan)*. Bandung: Fokusmedia.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tricahyo, Ibnu. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Winardi. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 23 tahun 2013 tentang Partisipasi
Masyarakat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemilihan
Umum Legislatif 2014.

Undang-Undang No 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.
22 tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Semarang dalam Angka 2014.